



Analisis Peran Desentralisasi sebagai Solusi untuk Mengatasi Ketimpangan Pembangunan di daerah

Septiyandri Sya'bani Zidane

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Desi Mehliana

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Davina Indah Ramadhani

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Muhammad Rizki

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Muhammad Rusdan

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Syalsabila

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Citra Darminto

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Alamat: Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

Korespondensi penulis: septiyandrizidan@gmail.com

Abstrak. *The development disparity among regions in Indonesia poses a significant challenge that can hinder economic growth and create social jealousy. This study aims to analyze the factors causing development disparity, the role of decentralization in addressing it, and the forms of decentralization implementation in Indonesia. The study collects data on variations in the Human Development Index (HDI) using a qualitative method and a descriptive analytical methodology. infrastructure distribution, and development fund allocation. The findings indicate that disparities are caused by differences in natural resources, demographic conditions, concentration of economic activities, and uneven fund allocation. Decentralization through regional autonomy, special allocation funds, special autonomy, and direct regional head elections offers solutions to accelerate equitable development. However, the success of decentralization heavily depends on regional readiness in managing resources and enhancing infrastructure and human resource capacities..*

Keywords: *Decentralization; Development disparity; Regional Autonomy*

Abstrak. Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia menjadi tantangan signifikan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan kecemburuan sosial. Tujuan penelitian menganalisis faktor penyebab ketimpangan pembangunan, peran desentralisasi dalam mengatasinya, dan bentuk penerapan desentralisasi di Indonesia. Metode penelitian ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis melalui pengumpulan data tentang perbedaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), distribusi infrastruktur, serta alokasi dana pembangunan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan karena perbedaan sda, kondisi demografis, konsentrasi kegiatan ekonomi, dan alokasi dana yang tidak merata. Desentralisasi melalui otonomi daerah, dana alokasi khusus, otonomi khusus, dan pemilihan kepala daerah langsung menjadi solusi yang dapat mempercepat pemerataan pembangunan. Namun, keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada kesiapan daerah mengelola sumber daya dan meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sumber daya manusia.

Kata Kunci: *Desentralisasi; Ketimpangan pembangunan; Otonomi Daerah.*

PENDAHULUAN

Ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia menjadi isu serius yang berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan jumlah pulau mencapai > 17 ribu, Indonesia menghadapi tantangan geografis dan demografis dalam mencapai pemerataan

pembangunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, terdapat kesenjangan signifikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara DKI Jakarta (83,08) dan Papua Pegunungan (53,42).¹ Ketimpangan ini mencerminkan disparitas dalam akses terhadap pelayanan dasar yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dampaknya tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menciptakan kecemburuan sosial di antara wilayah maju dan tertinggal. Salah satu solusi yang diharapkan mampu mengatasi ketimpangan ini adalah desentralisasi. UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, desentralisasi ialah penyerahan tugas pemerintahan pusat kepada daerah otonom memiliki prinsip otonomi.² Melalui desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola wilayahnya sesuai potensi lokal. Dalam teori, desentralisasi memungkinkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Namun, dalam praktiknya, keberhasilan desentralisasi bergantung pada kesiapan daerah dalam mengelola sumber daya dan mengoptimalkan pembangunan lokal.

Secara ideal, desentralisasi diharapkan mampu meratakan pembangunan. Namun, realitas menunjukkan bahwa ketimpangan masih terjadi akibat faktor seperti distribusi dana yang tidak proporsional, perbedaan sumber daya alam, dan konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah tertentu. Penelitian ini memberikan kebaruan dengan menggabungkan analisis empiris faktor penyebab ketimpangan pembangunan dan evaluasi penerapan desentralisasi di Indonesia. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya membahas efektivitas desentralisasi secara umum, artikel ini fokus pada bagaimana kesiapan daerah memengaruhi keberhasilan desentralisasi dalam mengurangi ketimpangan. Tujuan penelitian: (1) menganalisis faktor penyebab ketimpangan pembangunan antarwilayah, (2) peran desentralisasi dalam mengatasi ketimpangan, dan (3) mengidentifikasi bentuk penerapan desentralisasi yang efektif di Indonesia. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian memberi rekomendasi praktis mengoptimalkan desentralisasi dalam mewujudkan pembangunan merata di seluruh wilayah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode dalam artikel ini ialah kualitatif dengan tipe deskriptif analisis yang terlihat dari pendekatan dalam mendeskripsikan fakta dan menganalisis penyebab ketimpangan pembangunan di Indonesia. Penulis memulai dengan menggambarkan fenomena ketimpangan pembangunan antar wilayah, seperti perbedaan mencolok dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara DKI Jakarta dan Papua Pegunungan. Fakta-fakta ini kemudian dianalisis untuk memahami hubungan antara berbagai faktor, seperti perbedaan sumber daya alam, kondisi demografis, infrastruktur yang tidak merata, konsentrasi kegiatan ekonomi, dan alokasi dana pembangunan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

¹ Badan Pusat Statistik Indonesia. *[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi*. (15 November 2024).

² UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 (8), (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014).

A. Faktor penyebab ketimpangan di Indonesia

Faktor penyebab ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah : 1) Perbedaan kandungan sda 2) Perbedaan kondisi demografis 3) Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa 4) Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah 5) Alokasi dana pembangunan daerah.³

1. Perbedaan kandungan sumber daya alam

Setiap wilayah di Indonesia mempunyai kandungan sda yang berbeda-beda. Wilayah seperti Sumatera dan Kalimantan kaya akan sumber daya seperti minyak, gas, dan tambang, sedangkan beberapa wilayah lain yang mempunyai sda tetapi tidak sebanyak yang ada di wilayah lain atau daerah mempunyai sda yang banyak tetapi tidak bisa mengelola sda tersebut. Ketimpangan ini menyebabkan daerah yang kaya sumber daya menjadi lebih maju karena pendapatannya tinggi, sementara daerah lain tertinggal.

2. Perbedaan kondisi demografis

Tingkat pembangunan suatu daerah dipengaruhi secara signifikan oleh demografinya. Daerah dengan populasi yang tinggi dan tenaga kerja produktif, seperti Jawa, cenderung lebih berkembang. Sebaliknya, wilayah yang berpenduduk sedikit atau memiliki angka ketergantungan tinggi, seperti Papua, sering kali mengalami kesulitan dalam mencapai pembangunan yang merata.

3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa

Infrastruktur yang tidak merata di seluruh Indonesia menjadi hambatan utama dalam mobilitas barang dan jasa. Wilayah dengan infrastruktur yang baik, seperti Jawa, dapat menghubungkan aktivitas ekonomi dengan lebih efisien dibandingkan daerah yang sulit diakses seperti Maluku atau Papua. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam akses ke pasar, peluang bisnis, dan pertumbuhan ekonomi.

4. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Kegiatan ekonomi Indonesia sangat terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu, terutama di Pulau Jawa. Jakarta, misalnya, menjadi pusat ekonomi nasional, sementara daerah lain lebih banyak bergantung pada sektor primer seperti pertanian atau perikanan. Ketimpangan ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi antar wilayah.

³ Azim, A. N., Sutjipto, H., & Ginanjar, R. A. F. Determinan ketimpangan pembangunan ekonomi antarprovinsi di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, Vol 2(1), (2022) Hlm 1-16.

5. Alokasi dana pembangunan daerah

Dana pembangunan daerah sering kali tidak dialokasikan secara proporsional sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Ada daerah yang mendapatkan anggaran besar tetapi pengelolaannya kurang optimal, sementara daerah lain yang sangat membutuhkan justru kekurangan dana. Kebijakan fiskal yang belum sepenuhnya merata ini memperburuk ketimpangan pembangunan.

B. Peran Desentralisasi mengatasi ketimpangan pembangunan

Dalam upaya untuk mengatasi ketimpangan pembangunan, pemerintah pusat memberi wewenang ke pemerintah daerah atau desentralisasi. Mengapa demikian karena adanya otonomi daerah sebagai hasil dari adanya desentralisasi. UU No 23 Tahun 2014, "Otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI." ⁴

Otonomi daerah menjadi konsep utama memberi ruang lebih luas bagi pemda untuk mengelola wilayahnya. Melalui otonomi daerah, pemerintah, termasuk pemerintahan desa, memperoleh kewenangan untuk membuat keputusan dan kebijakan sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Pemberian otonomi bukan sekadar memberikan kebebasan, tetapi juga menuntut tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya dan potensi lokal untuk memajukan daerah. Otonomi daerah berperan sebagai alat penting dalam mempercepat pembangunan, karena pemerintah daerah berada dekat dengan masyarakat dapat lebih memahami kebutuhan mereka dan memberikan respons yang lebih cepat dan efektif. ⁵

C. penerapan desentralisasi di indonesia

Desentralisasi di Indonesia diterapkan melalui otonomi daerah yang memberi kewenangan kepada pemda untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Berikut adalah beberapa contoh penerapan desentralisasi di Indonesia:

1. Otonomi Daerah

Pemerintah daerah, baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota, mempunyai kewenangan membuat Perda yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Contohnya, pengelolaan sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi di daerah dilakukan pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU)

⁴ UU Republik Indonesia No 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 (6), (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014).

⁵ Handraini, H., Frinald, A., Magriasti, L., & Hendranaldi. *Konsep desentralisasi dan otonomi daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa di Indonesia*. Jurnal Professional, Vol 11(2), (2024), 601-608.

Pemerintah pusat memberi anggaran kepada daerah melalui DAK dan DAU untuk mendukung program-program pembangunan lokal. Misalnya, pembangunan infrastruktur jalan di daerah terpencil.

3. Otonomi Khusus

Otonomi khusus lahir dari konsep desentralisasi asimetris, yakni peraturan khusus berlaku untuk daerah tertentu. Metode ini dianggap sebagai solusi alternatif untuk masalah hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁶ Contohnya, otonomi Aceh memungkinkan provinsi untuk mengembangkan model pembangunan dan demokratisasi berbeda melalui desentralisasi yang tidak simetris. Nilai-nilai agama dan adat yang kuat berasal dari kebudayaan masyarakat yang menjadi dasar model ini. Dengan autonominya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Aceh sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk menerapkan dan menginovasi.⁷

4. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Pemilihan gubernur, bupati, wali kota secara langsung oleh masyarakat di daerah masing-masing merupakan bentuk nyata dari demokrasi desentralisasi. Mekanisme ini memungkinkan warga daerah untuk terlibat aktif dalam menentukan pemimpin yang dianggap mampu merepresentasikan aspirasi mereka dan memenuhi kebutuhan spesifik wilayah tersebut. mekanisme ini mencerminkan pentingnya prinsip otonomi daerah, di mana masyarakat lokal diberi ruang untuk menentukan arah pembangunan daerah mereka, sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya setempat.

KESIMPULAN

Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia merupakan tantangan besar yang dipengaruhi berbagai faktor, yakni perbedaan sda, kondisi demografis, infrastruktur tidak merata, konsentrasi kegiatan ekonomi, alokasi dana pembangunan yang tidak proporsional. Ketimpangan ini berdampak signifikan terhadap akses masyarakat terhadap layanan dasar, tingkat kesejahteraan, dan stabilitas sosial-ekonomi. Dalam konteks ini, desentralisasi menjadi solusi yang diharapkan mampu mengatasi masalah tersebut melalui pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola potensi lokal sesuai karakteristik masing-masing wilayah. Penerapan desentralisasi, seperti otonomi daerah, dana alokasi khusus, otonomi khusus, dan

⁶ Istanti, D. J., Febriani, A., & Ariani, N. *Desentralisasi Asimetris dalam Resolusi Konflik Separatisme Aceh dan Papua. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol 7(2), (2021), Hlm 257-269.

⁷ Sanur, D. (2020). Implementasi kebijakan otonomi khusus di Aceh [implementation of special autonomy policies in Aceh]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(1), 65-83.

pemilihan kepala daerah secara langsung, menunjukkan adanya ruang bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azim, A. N., Sutjipto, H., & Ginanjar, R. A. F. (2022). Determinan ketimpangan pembangunan ekonomi antarprovinsi di indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1-16.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (15 November 2024). *[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi*. Diakses pada 6 Desember 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDk0IzI%3D/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>
- Handraini, H., Frinald, A., Magriasti, L., & Hendranaldi. (2024). Konsep desentralisasi dan otonomi daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa di Indonesia. *Jurnal Professional*, 11(2), 601-608.
- Istanti, D. J., Febriani, A., & Ariani, N. (2021). Desentralisasi Asimetris dalam Resolusi Konflik Separatisme Aceh dan Papua. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 257-269
- Sanur, D. (2020). Implementasi kebijakan otonomi khusus di Aceh [implementation of special autonomy policies in Aceh]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(1), 65-83.
- Simatupang, P., & Akib, H. (2011). Efektivitas implementasi dan dampak kebijakan dalam konteks desentralisasi pemerintahan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 2(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. (2014). Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.